**SIGNIFIKANSI PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PEMERINTAHAN**

Sebagaimana diketahui, dunia saat ini tengah berada pada era globalisasi dengan interkonektivitas yang semakin tinggi dan interdependensi yang semakin tinggi pula. Globalisasi juga menjadi suatu masa ketika dunia dan negara-negara didalamnya dihadapkan pada persoalan ataupun permasalahan yang nyatanya tidak mampu diselesaikan secara individual oleh setiap negara ataupun diselesaikan secara bilateral. Globalisasi dengan segala fenomenanya menghadapkan negara-negara kepada suatu permasalahan krusial yang mau tidak mau harus diselesaikan secara kolektif atau bersama-sama karena tingkat urgensi yang tinggi yang menyangkut kehidupan umat manusia, misalnya saja persoalan mengenai kemanusiaan, lingkungan, dan kesehatan. Dari fakta yang dihadapi itulah, negara-negara mulai membentuk suatu mekanisme global untuk mengatasi masalah tersebut melalui organisasi-organisasi pemerintah yang bersifat internasional (IGO). Tetapi nyatanya IGO saja tidak cukup mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, perlu adanya peran serta masyarakat internasional untuk turun tangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Melalui latar belakang itulah organisasi-organisasi internasional non pemerintah (INGO) terbentuk.

Mengutip penjelesalan dari Hickey Bebbington, menyebutkan bahwa, *“In being ‘‘not governmental’’ they constitute vehicles for people to participate in development and social change in ways that would not be possible through government programmes. In being ‘‘not governmental’’ they constitute a ‘‘space’’ in which it is possible to think about development and social change in ways that would not be likely through government programmes* (Bebbington dalam Lewis, 2009:5). Ini memiliki arti bahwa INGO untuk memberikan tempat atau kesempatan bagi individu, masyarakat dan setiap elemen yang bukan negara untuk berperan serta dalam proses perkembangan dan juga perubahan sosial yang bisa jadi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara. INGO merupakan wadah bagi setiap elemen masyarakat untuk dapat berkontribusi bagi dunia atau lingkungan sekitar. INGO juga merupakan suatu organisasi yang jumlahnya senantiasa meningkat setiap tahunnya. Tercatat, ada lebih dari 300 INGO yang beroperasi dan aktif di dunia (Lewis, 2009:1). INGO juga merupakan suatu organisasi yang tidak terbatas pada satu isu saja. Lewis dalam artikelnya mengklasifikasikan INGO menjadi dua tipe berdasarkan apa yang menjadi kegiatan dan tujuannya (Lewis, 2009:1). Tipe pertama adalah INGO yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti misalnya OXFAM, dan MSF, World Vision. Tipe kedua adalah INGO yang bergerak secara khusus untuk advokasi kebijakan serta kampanye publik untuk mengejar perubahan sosial, misalnya WWF yang memiliki pengaruh yang besar di pemerintah negara Fiji untuk melakukan pelestarian terhadap ikan-ikan di laut. Kegiatan yang dilakukan oleh suatu INGO sangat beragam seturut dengan isu yang menjadi fokus organisasi tersebut, misalnya saja INGO yang bergerak dalam isu pmebangunan demokrasi, resolusi konflik, hak asasi manusia, analisis kebijkan hingga isu-isu lingkungan dan kebudayaan (Lewis, 2009:1).

Meskipun INGO merupakan organisasi yang berperan sebagai badan yang independen dari campur tangan negara, tetapi INGO tetap memiliki *link* atau keterkaitan dengan negara (pemerintah) dan bahkan dengan organisasi pemerintah yang bersifat internasional (IGO) seperti PBB. Sebagai sebuah badan yang dikenal sebagai *third sector actor* atau *third force* dalam ranah konstelasi perkembangan dunia, INGO memiliki peranan penting jika dihubungkan dengan negara dan IGO (Beckfield, 2003:402). Jika ditilik dari hubungan ketiganya, INGO memiliki peran dan hubungan sebagai *implementer,* katalis, dan partner atau rekan (Lewis, 2009:2). Disebut sebagai implementer karena INGO memiliki fokus pada mobilisasi sumberdaya untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkannya. Mobilisasi barang dan jasa yang dimaksudkan adalah alat-alat kesehatan, bantuan agrikultural, mikrofinansial, penanganan terhadap bencana dan lain sebagainya (Lewis, 2009:2). Karena perannya yang sangat krusial dan bermanfaat bagi negara, seringkali INGO tertentu “dikontrak” oleh suatu negara untuk membantu menyelesaikan suatu kasus tertentu. Sedangkan peran katalis memiliki arti bahwa INGO memiliki kemampuan untuk memberikan masukan, fasilitas atau kontribusi pemikiran bagi negara ataupun IGO untuk mengadakan suatu transformasi sosial. Peran ini bisa dilakukan mengingat pula jaringan INGO yang banyak dan tersebar di banyak negara. Ketiga adalah peran INGO sebagai *partner* atau rekan sekerja negara dan IGO. Melalui peran ini, ketiga aktor ini saling bekerjasama dalam sektor tertentu untuk mencapai atau mengejar suatu tujuan yang telah ditentukan seperti misalnya kerjasama dalam *capacity building* dan mengatasi permasalahan lingkungan.

INGO sebagai sebuah organisasi yang beranggotakan setiap elemen yang non pemerintahan, memiliki beberapa mekanisme sendiri dalam pemilihan anggotanya, pengambilan keputusan dan pembiayaannya. Pemilihan anggota untuk terlibat dalam suatu INGO lebih bersifat sukarela. Banyak diantara INGO yang ada, tidak memberikan karakteristik khusus untuk dapat bergabung dalam INGO tersebut selama sukarelawan tersebut memiliki ketertarikan yang sesuai dengan fokus INGO dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu yang diangkat dalam INGO tersebut. Untuk mekanisme pengambilan keputusan, tidak jauh berbeda dengan beberapa organisasi internasional lain, mekanisme pengambilan keputusan dalam INGO pada umumnya bersifat *simple majority* dari quorum yang ada. Sistem pendanaan juga bersifat sukarela dari pihak-pihak non pemerintah – dari individu ataupun sektor privat tetapi juga tidak menutup kemungkinan INGO mendapatkan bantuan dari negara-negara dan bahkan IGO seperti UN dan World Bank. Terkait dengan struktur, berbeda dengan gerakan sosial, INGO memiliki struktur yang lebih stabil – permanen. Setidaknya, suatu INGO memiliki dasar struktur organisasi yang jelas dan stabil seperti anggota permanen, kantor, dan pengaturan keuangan (Martens, 2002:9). Secara garis besar, dikatakan oleh Martens (2002) bahwa sebagian besar memiliki badan-badan seperti *central office,* sekretariat atau *headquarter*, komite atau komisi. INGO juga merupakan institusi formal yang memiliki pemerintahannya sendiri serta memiliki aturan-aturan yang berlaku didalamnya.

Memang benar bahwa INGO telah memainkan peran yang tidak bisa diremehkan dalam konstelasi perkembangan dunia. Kehadiran INGO bisa dikatakan sebagai angin segar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam tataran pemerintah. INGO juga menjadi sangat krusial memainkan perannya terkait dengan banyaknya masyarakat-masyarakat internasional yang turut serta bergabung dan memberikan kontribusi serta sumbangsih bagi adanya atau terciptanya suatu perubahan sosial baik berupa tenaga, materi, ataupun ide dan kreativitas. Karena keberadaannya yang dikelola oleh masyarakat secara langsung atau pihak non pemerintah, maka pemerintah pun tidak dapat dengan semena-mena ikut campur ketika terjadi permasalahan internal dalam INGO. Fakta ini membuat INGO menjadi suatu agen yang netral dari pemerintahan manapun (Lewis, 2009:4). Nilai tambahan atau kelebihan lain dari INGO adalah mekanisme penyelesaian terhadap suatu isu, karena INGO seringkali memiliki cabang di banyak negara dan dikelola oleh masyarakat sipil, seringkali penyelesaian masalah bisa langsung dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui mekanisme yang panjang layaknya birokrasi negara. INGO pun sebagai organisasi yang independen, juga mampu memberikan ide-ide serta usulan kepada negara terhadap suatu isu tertentu (Lewis, 2009:4). Namun, meskipun demikian, INGO juga mendapatkan banyak kritik terhadap apa yang dilakukannya. Kritik seringkali berangkat dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari suatu INGO. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini membuat INGO saat ini dianggap lebih pada sebagai organisasi sektor privat daripada organisasi independen yang mengakomodasi sumbangsih masyarakat sipil. Kritik dan kelemahan dari NGO juga terdapat pada keterbatasan akses dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga pengaruh yang diberikan kepada pemerintah untuk merubah atau membentuk suatu kebijakan belum begitu seignifikan – NGO juga tidak memiliki hak voting, fakta ini semakin membuat INGO tidak memiliki kekuatan yang besar dalam pembuatan keputusan pemerintahan (Betsill & Corell, 2001:68). Kelemahan dan kritik selanjutnya berkenaan dengan sistem pendanaan di INGO yang bersifat sukarela. Adanya sistem ini seringkali membuat INGO tidak memiliki sumberdana yang tetap dan stabil.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa seperti halnya koin yang memiliki dua sisi, maka keberadaan INGO pun juga memiliki kelebihan dan kekurangan serta mendapatkan kritikan terkait dengan kegiatannya. Tetapi terlepas dari setiap kelemahan dan kritik yang ditujukan pada INGO, keberadaan INGO pun tetap memiliki peranan yang besar bagi penyelesaian isu-isu yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan INGO yang dikelola oleh masyarakat sipil memberikan poin penting tersendiri bagi pengaruhnya dalam penyelesaian isu-isu yang ada. Disini penulis berpendapat bahwa INGO ditengah-tengah terpaan kritik dan kelemahan yang ada, tetap memiliki signifikansi dalam proses penyelesaian suatu isu. Hal ini dapat dilihat dari peranan WWF di negara-negara Pasifik Barat Daya yang bukan hanya memberikan bantuan dana ataupun bantuan tenaga ahli untuk mengatasi permasalahan lingkungan, tetapi juga memberikan penyuluhan serta pelatihan untuk bisa *survive* dalam permasalahan lingkungan yang ada.

Referensi:

Elisabeth Corell and Michele M. Betsill. 2008. “Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats”, dalam Michele M. Betsill and Elisabeth Corell (ed.), *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations.* [PDF] London: MIT Press, hal.65-85.

##### Jason Beckfield. 2003. “Inequality in the world policy: The Structure of IO”, *American Sociological Review.* 68 (3): 401-424.

##### Lewis, David. 2009. Nongovernmental Organization, Definition and History. [PDF] London School of Economic and Political Science. Tersedia dalam: <http://personal.lse.ac.uk/lewisd/images/encylciv%20societyngos2009-dl.pdf> (diakses pada 18 Desember 2013).

##### Martens, Kerstin. 2002. Mission Impossible? Defining Nongovenmental Organization. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations.* 13 (3): 271-285.